

PENDEKATAN STUDI MAKRO DALAM PERENCANAAN WILAYAH

WIDHIANTINI

Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Bali dan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Email: wiwin_purantara@yahoo.com

ABSTRACT

The goal of this macro study is preparing an integrated development planning for a regency. The specific goals are to identify and analyze potential, problem, and need in the regency; and to recommend programs needed by the people to make a sustainable development comes true.

Macro study approach is a scientific method combining rational method based on the review of previous studies by government agencies with empirical method using survey technique. Data collected include primary and secondary. Secondary data an gained from many institutions, and primary data are collected using observation and interview methods.

Bali area has no natural resources like forest, mining, petroleum and coal that give income for the region or government. Therefore, the review of this macro study is very relevant in developing a region, especially rural area based on its strengths, example Karangasem Regency.

The reason to choose Karangasem Regency are as follows (1) Karangasem Regency is an area of agricultural commodity and (2) based on the Act No.24/1992, Karangasem Regency is located in quadrant III, i.e., rural corporate area supported by tourism area.

The result of study indicated that: (1) potentials of this regency are: (a) laborer adsorbed in agricultural sector is 75,62%, (b) high productive age is 70%, (c) high entrepreneurship of villagers, (d) more than 50% of women are working in small industry, (e) the existence of written and oral regulation from subak and customary village institution, and (f) life principle which is still attached on Balinese (Tri Hita Karana). Problem of this regency are: (a) high input price, (b) limited of land, capital, marketing, and technology, (c) unpredictable price fluctuation and season of agricultural products, (d) low access to continue high school and courses due to limited facility, (e) low treatment skill of volunteer, and (f) limited local government finance. The needs of this regency are: (a) guarantee of agricultural product price, (b) market that can collect all production yield, (c) support and capital assistance from government or private to expand UKM, (d) skill training and capital assistance from local government for small industry, (e) finance assistance from foreigner for regional development, and (f) multi way and coordination among the local people (custom village) and government coordinators.

Key Words: Regional Planning, Potentials, Problems, Needs, Scenario Analysis, Program Format

ABSTRAK

Tujuan studi makro ini adalah mempersiapkan perencanaan pembangunan yang terpadu (*integrated*) bagi kabupaten. Sedangkan tujuan khususnya sebagai berikut: (1) mengidentifikasi dan menganalisis potensi, masalah dan pembatas serta kebutuhan di kabupaten; dan (2) merekomendasi program-program yang dibutuhkan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembahasan ini hanya menyangkut analisis potensi, masalah dan keterbatasan serta kebutuhan di tingkat kabupaten.

Metode pendekatan studi makro adalah metode ilmiah yang memadukan metode rasional yang didasarkan pada hasil-hasil kajian sebelumnya oleh instansi yang berwenang dengan metode empiric yang memanfaatkan teknik survei. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai institusi,

sedangkan dalam pengumpulan data primer digunakan metode observasi (pengamatan) dan wawancara.

Daerah Bali tidak memiliki sumber daya alam, seperti hutan produksi, tambang minyak dan gas serta batu bara yang mendatangkan devisa bagi daerah maupun negara. Untuk itulah pengkajian studi makro ini sangat relevan dalam mengembangkan suatu wilayah, khususnya pedesaan berdasarkan keunggulan-keunggulan yang ada, contohnya Kabupaten Karangasem.

Alasan dipilihnya Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut: (1) Kabupaten Karangasem merupakan wilayah komoditas pertanian dan (2) berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 1992, kabupaten Karangasem berada di kwadran III, yaitu kawasan budidaya perdesaan dengan fungsi gabungan antara kawasan budidaya dan kawasan perdesaan dengan didukung oleh kawasan pariwisata. Potensi yang dimiliki kabupaten ini antara lain: (a) tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian sebesar 75,62%, (b) tingginya usia produktif (70%), (c) lebih dari 50% wanita bekerja di industri kecil/kerajinan RT, (d) jiwa kewirausahaan yang tinggi dari pengrajin, (e) aturan tertulis dan lisan dari kelembagaan subak dan desa adapt, dan (f) falsafah hidup yang masih melekat pada masyarakat Bali (Tri Hita Karana). Masalah yang dihadapi antara lain: (a) tingginya harga saprodi, (b) keterbatasan lahan, modal bagi petani dan sistem birokrasi yang panjang dalam perkreditan, serta keterbatasan pemasaran dan teknologi, (c) fluktuasi harga dan musim dari produk-produk pertanian tidak dapat diprediksi secara pasti, (d) rendahnya akses untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan ketrampilan karena keterbatasan fasilitas, (e) masih rendahnya ketrampilan pengobatan dari para tenaga sukarelawan dan (f) keterbatasan sumberdaya finansial pemerintah setempat. Sedangkan kebutuhan dari kabupaten ini antara lain: (a) jaminan harga produk pertanian, (b) pasar yang dapat menampung hasil produksi, (c) bantuan dukungan dan permodalan dari pemerintah dan swasta untuk mengembangkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), (d) penyediaan fasilitas pendidikan tinggi serta pembinaan ketrampilan berkelanjutan dari pemerintah setempat, (e) bantuan finansial dari pihak asing untuk pembangunan daerah, dan (f) koordinasi yang searah dan terbuka antara masyarakat, desa adat, dan instansi setempat.

Kata Kunci: Perencanaan Regional, Potensi, Masalah, Kebutuhan, Analisis Skenario, Format Program

PENDAHULUAN

Ilmu pembangunan wilayah sebagai salah satu studi pengimplementasian dari beberapa disiplin ilmu, seperti geografi, ekonomi, perencanaan kota dan teori lokasi. Menurut Misra (1977) ilmu pembangunan wilayah harus juga ditopang dengan beberapa aspek, seperti: biogeofisik, ekonomi, sosiobudaya, kelembagaan, lokasi, dan lingkungan.

Kebutuhan terhadap pembangunan wilayah memerlukan studi pendahuluan yang sering diformat sebagai perencanaan. Nehru (1993) mendefinisikan perencanaan secara sederhana dan pragmatis, menyatakan bahwa “*planning is the exercise of intelligence to deal with facts and situations as they are and find a way to solve problems.*” Perencanaan merupakan suatu proyeksi yang diharapkan terjadi dalam jangka waktu tertentu di masa depan, sehingga para perencana perlu menghitung dan menganalisa serta membuat asumsi-asumsi agar proyeksi tersebut dapat tercapai.

Y.Dior (1996) memaparkan perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Definisi ini secara implisit mengandung tiga pilar, yaitu: (1) berhubungan dengan hari depan, (2) menyusun seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Dewasa ini terdapat kecenderungan yang besar dari pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian pada pembangunan pedesaan sebagai landasan yang kuat bagi pembangunan selanjutnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan *misleading policy* di masa lalu, dimana penetesan *top down planning* pada masa itu masih mendominasi dibandingkan *bottom up planning*.

Keterpaduan kedua hal tersebut dicetuskan oleh Ditjen Bangdes melalui keterpaduan antara *top down planning* dengan *bottom up planning*. Dalam rangka itu, pengkajian awal sebelum mencanangkan suatu program akan dilakukan melalui dua level pengkajian, yaitu: (1) studi makro di tingkat kabupaten/propinsi dan (2) studi mikro di tingkat kecamatan. Dalam mewujudkan *symetric planning*, pengkajian awal secara makro di tingkat kabupaten dijadikan dasar dalam pelaksanaan studi mikro. Hal ini tidak terlepas dari *framework* pembangunan nasional dan kondisi serta potensi pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Relevansi studi makro ini juga merupakan landasan dasar dalam mewujudkan otonomi daerah. Salah satu esensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah adalah dalam upaya mempercepat pencapaian pemerataan direalisasikan melalui pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri yang sesuai dengan prakarsa dan kemampuan serta potensi yang dimiliki.

Studi makro ini bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan yang terpadu bagi kabupaten. Sedangkan tujuan khususnya untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi, masalah dan pembatas serta kebutuhan di kabupaten yang pada akhirnya akan merekomendasikan program-program yang dibutuhkan masyarakat secara berkelanjutan. Studi makro dilakukan di Kabupaten Karangasem yang pelaksanaannya selama enam bulan pada tahun 2000 dan direvisi kembali pada tahun 2003.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan studi makro adalah metode ilmiah yang memadukan metode rasional yang didasarkan pada hasil-hasil kajian sebelumnya oleh instansi berwenang dengan metode empirik yang memanfaatkan teknik survei. Studi makro ini bertujuan untuk

mempersiapkan perencanaan pembangunan yang terpadu (*integrated*) bagi kabupaten/kotamadya.

Penelusuran data studi makro diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelusuran berbagai institusi, sedangkan data primer digunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), teknik wawancara (*Semi Structural Interview*, SSI), dan teknik diskusi kelompok secara terfokus (*Focus Group Discussion*, FGD).

Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana serta bertindak. Sedangkan teknik wawancara dan diskusi kelompok dilakukan secara sistemik kepada informan (pengambil kebijakan, instansi) dan masyarakat (petani, nelayan, pedagang, pengusaha kecil/pengrajin, kelompok wanita) dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertentu (Chamber, 1992). Metode-metode tersebut bertujuan untuk menggali masalah, potensi, dan kebutuhan dari masyarakat pedesaan. Untuk itulah dilakukan analisis masalah melalui matriks turunan, dan analisis kebutuhan yang diperoleh melalui matriks interaksi masalah, kebutuhan, dan potensi.

Cakupan data dan aspek yang diperlukan dalam studi makro meliputi: (1) latar belakang informasi, terdiri atas: (a) profil kabupaten, (b) dinamika pembangunan, (c) rencana nasional dan regional serta dampaknya terhadap pembangunan pedesaan; (2) proses dan prosedur perencanaan, terdiri atas: (a) mekanisme perencanaan dari kabupaten, (b) sistem pengumpulan data untuk perencanaan dari bawah, (c) anggaran dan belanja pembangunan di tingkat kabupaten; dan (3) analisis sektoral terdiri atas: (a) sumberdaya alam dan lingkungan, (b) penduduk dan pola permukiman, (c) kondisi dan bentuk pertanian, (d) sistem irigasi, (e) analisis *performance* subak dan institusi lain yang dapat dikembangkan sebagai lembaga perekonomian desa, (f) kegiatan nonpertanian, (g) kondisi social dan infrastruktur, (h) analisis masalah, potensi dan kecenderungan pembangunan, (i) skenario pembangunan, (j) kebijakan, dan (k) program pembangunan dan rencana proyek. Sistematika analisis studi makro dapat terlihat pada Gambar 1.

S c r e e n i n g

I. Descriptive Regional Analysis

| | |
|---|---|
| Economy: FUNCTIONAL ANALYSIS ACCESSIBILITY ANALYSIS INPUT OUTPUT ANALYSIS TRADEMARKET AREA ANALYSIS | Biology: ECOLOGICAL RESOURCE INVENTORY BASELINE SYSTEMS ANALYSIS ENVIRONMENTAL CAPACITY ANALYSIS SENSITIVITY/RISK ANALYSIS |
| Institutional: STAKEHOLDER ANALYSIS STAKEHOLDER FORCEFIELD | Social: DEMOGRAPHIC ANALYSIS EDUCATION ACHIEVEMENT ANALYSIS HEALTH INCIDENT ANALYSIS GENDER ANALYSIS SERVICE AREA ANALYSIS |

Scoping

II. Rapid Appraisal of Key Issues

| |
|---|
| PROBLEM IMPACT DIAGRAM POTENTIAL MATRIX REGIONAL SWOT ANALYSIS PRIORITY MATRIX |
|---|

Focussing

III. Participatory Rural Appraisal

| |
|---|
| DEFINING AND GROUPING RESEARCH VARIABLES DEFINING (PROXY) INDICATORS DEFINING SURVEY UNITS DEFINING DATA COLLECTION METHODS VILLAGE MAPPING TRANSECT ANALYSIS SEASONAL CALENDER PARTICIPATORY OBSERVATION SEMI-STRUCTURED INTERVIEWING WEALTH RANKING PREFERENCE RANKING DEFINING THE SAMPLE |
|---|

IV

Interpretation of Finding and Futher Utilization

| |
|--|
| ANALYZING THE DATA PRESENTING THE RESULTS DETERMINING THE FURTHER UTILIZATION OF INFORMATION |
|--|

Gambar 1. *Rapid District Appraisal*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensial

Potensi dari pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan di Kabupaten Karangasem dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Potensi sumberdaya alam: Kabupaten Karangasem memiliki potensi hutan, sumberdaya air, pertanian dan perkebunan, yang semuanya merupakan basis dari pembangunan pariwisata.
2. Potensi sumberdaya manusia: 75,62% penduduk di kabupaten yang bekerja di sektor pertanian.
3. Potensi infrastruktur: adanya kondisi jalan yang baik dapat menyediakan fasilitas transportasi untuk sektor pertanian, pariwisata dan industri.
4. Potensi kelembagaan: pemerintah daerah, desa adapt, dan subak merupakan institusi yang bekerjasama menggerakkan pembangunan di sektor pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya.

Untuk mengidentifikasi potensi yang paling mempengaruhi pembangunan, digunakan matriks potensial (Tabel 1).

Tabel 1. Matriks Analisis Potensial

| No | Basic Potential | Derived Potential | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Hutan | | | | | * | * | | |
| 2 | Sumberdaya air | | | | | * | | | |
| 3 | Tanah vulkanis | | | | | * | | | |
| 4 | Lebih 70% penduduk usia produktif | * | * | | | | | * | |
| 5 | Lebih 50% penduduk usia kerja wanita | * | * | | | | | * | |
| 6 | Lebih dari 70% tenaga kerja terserap di pertanian | * | | | | | | * | |
| 7 | Kelembagaan LPD | * | * | * | * | | | * | * |
| 8 | Kelembagaan subak | * | * | * | * | | | * | * |
| 9 | Kelembagaan desa adat | * | * | * | | | | * | * |
| 10 | Gotong royong dan Tri Hita Karana | | | | | | | * | * |
| 11 | Industri tenun | | * | | * | | | | |
| 12 | Agrowisata | | * | | * | | | * | * |
| 13 | Wisata alam | | * | | | | | | |
| 14 | Wisata budaya | | * | | | | | | |
| 15 | Fasilitas SD dan SMP di setiap kecamatan | | | * | | | | * | |
| 16 | Fasilitas puskesmas, tenaga medis dan sukarelawan di setiap kecamatan | | | * | | | | | |
| 17 | Jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan | | | * | * | | | | |
| 18 | Fasilitas listrik terlayani di semua desa | | | * | | | | | |
| 19 | 55% air bersih terlayani di tingkat desa | | | * | | | | | |
| 20 | Fasilitas pariwisata | | * | | * | | | | |

Sumber: Hasil Analisis, 2003 (direvisi)

Keterangan :

- A. Industri pengolahan buah (salak menjadi manisan, selai)
- B. Industri pariwisata
- C. Pelayanan
- D. Perdagangan
- E. Konservasi sumberdaya alam
- F. Pengembangan hutan lindung (untuk cadangan air tanah)
- G. Pembangunan SDM
- H. Perencanaan *bottom up*

☒ * Ada keterkaitan antara *basic potential* dengan *derived potential*

☐ Tidak ada keterkaitan antara *basic potential* dengan *derived potential*

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa potensi yang sangat mendukung perkembangan sektor pertanian di daerah ini adalah potensi agrowisata salak, mengingat kabupaten ini (terutama Kecamatan Bebandem) memiliki daya dukung topografi yang sesuai dengan perkembangan komoditi salak (tanah berpasir dan curah hujan cukup tinggi). Disamping itu kelembagaan lokal (subak dan desa adat) selalu eksis mengelola daerahnya tersebut.

Analisis Masalah

Masalah-masalah di Kabupaten Karangasem dianalisis dengan tiga pendekatan, yaitu melalui wawancara mendalam dengan para pengambil kebijakan di pemerintah daerah (Ketua Bappeda dan kepala dinas), subyek pembangunan (petani, pedagang, anggota subak) dan melalui pengamatan langsung. Permasalahan tersebut dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: (1) masalah lingkungan, (2) masalah populasi dan pola permukiman fasilitas, (3) masalah sektor pertanian, (4) masalah sektor non pertanian, dan (5) masalah infrastruktur sosial dan fisik.

Masalah lingkungan berkaitan dengan kebakaran hutan dan erosi pantai. Masalah-masalah ini timbul karena meningkatnya permintaan manusia terhadap sumberdaya alam sehingga pada akhirnya terjadi eksploitasi besar-besaran tanpa didukung dengan pelestarian *life support system*.

Masalah populasi dan pola permukiman fasilitas menyangkut pemusatan fasilitas pendidikan SMU di ibukota kabupaten, penduduk miskin, dan penduduk usia kerja di seluruh kecamatan. Permasalahan ini timbul karena orientasi perencanaan yang bersifat *top-down*.

Masalah sektor pertanian berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan pariwisata, penebangan hutan secara liar, perkreditan, harga saprodi, pemasaran, dan harga yang diterima di tingkat petani. Kondisi ini timbul karena belum terdapatnya aturan secara *de facto* dan *de jure* tentang batas-batas maksimum bagi peruntukkan lahan dan belum adanya kepedulian penuh dari pihak pemerintah untuk mengangkat kedudukan petani.

Masalah sektor non pertanian lebih banyak terfokus pada sektor industri dan pariwisata. Sedangkan masalah infrastruktur social dan fisik berkaitan dengan aksesibilitas ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik dan komunikasi, serta air minum.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa permasalahan-permasalahan yang timbul disebabkan oleh perencanaan yang tidak bersifat *integrated* (skor=7). Dari aspek perencanaan pembangunan wilayah , perencanaan sering hanya melihat pandangan satu pihak, yaitu dari pihak perencana pusat yang kurang mengetahui secara tajam keadaan suatu wilayah, khususnya pedesaan. Bias yang terjadi terutama disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan tujuan yang diinginkan masyarakat wilayah dengan apa yang dipikirkan oleh pusat. Perencana pusat yang berada di luar wilayah dan tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang menimbulkan interaksi antara masyarakat wilayah dengan alam lingkungannya, cenderung memiliki kepentingan dan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah digariskan pusat, yang biasanya lebih mengutamakan percepatan ekonomi. Karena itu diperlukan adanya faktor penyesuaian antara program yang didesain perencana pusat dan kebutuhan masyarakat setempat atau sering disebut dengan *integrated top down* dan *bottom up*.

Tabel 2. Matriks Masalah di Kabupaten Karangasem

| No | Masalah → akibat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| | Masalah → sebab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aki- bat |
| 1 | Deforestation | | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 2 | Kapasitas air kurang | | | | * | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | * | | | 3 |
| 3 | Erosi tanah | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | 2 |
| 4 | Lahan kering 91,51% | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | Lahan pertanian kurang | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | Biaya input tinggi | | | | | | | | * | | * | | | | * | | | | | | | | | | | | 3 |
| 7 | Eksplorasi SDA oleh pengusaha | | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | 3 |
| 8 | Kesempatan kurang untuk non pertanian | | | | | | | | | | | | | * | | * | | | | | | | | | | | 2 |
| 9 | Tidak ada jaminan harga produk pertanian | | | | | | | | | | * | | | | * | | | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | Produktivitas padi rendah | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | Akses lembaga perkreditan terbatas | | | | | | | | | | * | | | | * | | | | | | | | | | | | 2 |
| 12 | 25% KK miskin | | | | | | | | | | | | | * | | * | | | | | | | | | | | 2 |
| 13 | Rendahnya usia kerja berpendidikan menengah | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | Promosi dan pemasaran terbatas | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Akses ke SMU terbatas | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | Distribusi guru tidak merata | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | 1 |
| 17 | Alat-alat laboratorium terbatas | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | 1 |
| 18 | Perkembangan sekolah terbatas | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | Apotek dan RSUD terbatas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | 1 |
| 20 | Pengobatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- |

[illegible]

Keterangan:

☐ Tidak ada hubungan sebab akibat

Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan (*need analysis*) juga digunakan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi-potensi dari beberapa kelompok yang berbeda dalam suatu wilayah (Tabel 3). Kelompok-kelompok tersebut meliputi: petani, penduduk usia produktif (khususnya usia sekolah), kelompok wanita, tenaga sukarelawan, pengusaha dalam skala kecil, pedagang perantara, investor, pemerintah daerah, subak, dan desa adat.

Tabel 3. Analisis Kebutuhan

| Kelompok | Masalah | Kebutuhan | Potensi |
|------------------------------------|---|---|--|
| Petani | <ul style="list-style-type: none"> - Harga saprodi tinggi - Penggunaan lahan semakin terbatas - Modal terbatas - Pemasaran terbatas (hanya bersifat local) - Penggunaan teknologi terbatas | <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan harga untuk produk-produk pertanian - Tingkat upah (buruh tani) dapat ditingkatkan - Pasar yang dapat menampung hasil petani secara kontinyu - Bantuan dana dari pemerintah dan swasta memperkuat UKM dan kemudahan memperoleh kredit - Kesempatan kerja di luar sektor pertanian sebagai aktivitas non basis | <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja di sektor pertanian - Memiliki jiwa kewirausahaan - Respon terhadap inovasi dan adopsi teknologi - Dapat berpartisipasi sebagai subyek dalam program-program pembangunan |
| Penduduk usia produktif | <ul style="list-style-type: none"> - Akses ke sekolah menengah tidak merata untuk masing-masing kecamatan - Akses terbatas dalam menempuh pendidikan ketrampilan yang terqualifikasi | <ul style="list-style-type: none"> - SMU merata di setiap kecamatan - Distribusi guru merata di setiap kecamatan - Tersedianya alat-alat laboratorium - Pendidikan ketrampilan melalui kursus-kursus yang terqualifikasi | <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya usia produktif |
| Kelompok wanita | <ul style="list-style-type: none"> - Umumnya koordinasi masih sebatas di tingkat desa - Kurangnya pembinaan dari luar/pemerintah - Terbatasnya akses untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk organisasi wanita yang produktif di tingkat kecamatan dan didukung dengan organisasi di tingkat kabupaten - Mendapat dukungan dan pembinaan berkelanjutan dari pemerintah daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Ketrampilan dan kreativitas wanita (khususnya kerajinan RT) memenuhi permintaan pasar - Memiliki jiwa kewirausahaan |
| Tenaga sukarelawan di tingkat desa | <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan ketrampilan tentang medis tergolong terbatas | <ul style="list-style-type: none"> - Memerlukan pengetahuan dan ketrampilan praktis berkaitan dengan tindakan preventif | <ul style="list-style-type: none"> - Tetap eksis membantu di setiap desa |
| Tenaga sukarelawan di tingkat desa | | <ul style="list-style-type: none"> - Memerlukan perhatian dari pemerintah daerah, misalnya memberikan insentif | |
| Pengusaha skala kecil dan menengah | <ul style="list-style-type: none"> - Modal terbatas - Keterbatasan dalam pembinaan seperti latihan-latihan ketrampilan dan kewirausahaan | <ul style="list-style-type: none"> - Memerlukan pembinaan dan bantuan modal dari pemerintah daerah dan swasta secara berkelanjutan untuk memperkuat UKM | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan berkreasi dan jiwa kewirausahaan |
| Pedagang perantara | <ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi harga dan musim dari produk-produk pertanian tidak dapat diprediksi secara pasti | <ul style="list-style-type: none"> - Memerlukan ketersediaan barang dalam jumlah yang stabil | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki jalur pemasaran dan mendapat pelayanan kredit dari Lembaga Perkreditan Desa |
| Investor | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya kesempatan investasi di desa akibat | <ul style="list-style-type: none"> - Pembenahan infrastruktur basis dan non basis | <ul style="list-style-type: none"> - Finansial investor sangat kuat - Dapat memberikan ide-ide dan |

| | terbatasnya pembangunan infrastruktur | | teknologi baru |
|-------------------|--|--|--|
| Pemerintah daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sumberdaya financial - Kekurangan staf yang berkualifikasi - Kadang-kadang dijumpai miskordinasi antara departemen dengan dinas dan Bappeda | <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan pengelolaan finansial lebih diorientasikan ke daerah - Bantuan dana dari pihak luar - Peningkatan kualitas SDM - Masyarakat setempat turut berperan sebagai subyek | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya perencanaan dari tingkat desa sampai tingkat propinsi - Memiliki petugas penyuluhan di tingkat desa |
| Subak | <ul style="list-style-type: none"> - Belum berbadan hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk badan hukum - Membentuk lembaga ekonoi disamping sebagai lembaga sosio-culture-religius - Bantuan kredit lunak dari pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> - Sifat gotong royong tinggi - Memiliki aturan (awig-awig) tertulis dan tidak tertulis - Adanya koordinasi antara subak dan antara subak dengan pemerintah - Dilandasi filosofi Tri Hita Karana |
| Desa adat | <ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan membina masyarakat yang terbawa arus elit politik tertentu | <ul style="list-style-type: none"> - Memerlukan koordinasi yang searah dan terbuka dengan aparat masyarakat yang terkait | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki aturan yang kuat dan dilandasi dengan falsafah hidup masyarakat Bali |

Sumber: Hasil Analisis, 2003 (direvisi)

Tujuan Pembangunan dan Alternatif Strategi

Telaahan terhadap pembangunan, tidak dapat dilakukan hanya melalui disiplin ilmu yang terbatas, bahkan kini pembangunan ekonomi pun bukan lagi monopoli pakar ekonomi. Dalam membahas makna pembangunan, kerap kali terjadi pembauran pengertian dengan makna pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, modernisasi, nasionalisme, peralihan kekuasaan, kemandegan, bantuan teknis, dan lain sebagainya. Misalnya, modernisasi berarti perubahan sosial dimana komponen ekonomi dalam pembangunan adalah keliru bila dipakai untuk menyatakan pembangunan seutuhnya.

Secara realitas, makna pembangunan itu sendiri masih dapat dilihat lebih jauh lagi, tidak hanya terbatas pada perubahan-perubahan tetapi juga meliputi nilai-nilai dari pembangunan itu sendiri.. Hoover (1975) membedakan makna pembangunan berdasarkan konsep normatif dan pembangunan sebagai proses empiris dari perubahan.

Sebagai suatu konsep normative, pembangunan meliputi nilai-nilai, tujuan dan tolak ukur sehingga dapat diperbandingkan keadaan yang sekarang dan yang diinginkan di kemudian hari. Maknanya sebagai konsep normatif hampir sama dengan perbaikan-perbaikan, dan dalam hal ini diperlukan kesepakatan nilai (*value judgements*). Untuk itu perlu dilakukan skala prioritas program berdasarkan kriteria seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Matriks Alternatif Program Pembangunan

| Kriteria | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | |
| | Bt | N | Jml | Bt | N | Jml | Bt | N | Jml | Bt | N | Jml | Bt | N | Jml | Bt | N | Jml |
| Peningkatan produksi dan produktivitas | 15 | 3 | 45 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2 | 30 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 20 | 5 | 1 | 5 |
| Daya dukung lahan dan air | 15 | 3 | 45 | 5 | 1 | 5 | 25 | 3 | 75 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Kegiatan ekonomi pedesaan | 25 | 3 | 75 | 20 | 3 | 60 | 10 | 1 | 10 | 25 | 3 | 75 | 25 | 3 | 75 | 15 | 2 | 30 |
| Peningkatan swadaya masyarakat | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 15 | 2 | 30 |
| Penciptaan lapangan kerja | 20 | 3 | 60 | 30 | 3 | 90 | 10 | 1 | 10 | 20 | 2 | 40 | 20 | 3 | 60 | 10 | 1 | 20 |
| Hubungan antar desa | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 2 | 30 |
| Pendapatan desa | 10 | 2 | 20 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 15 | 1 | 15 | 10 | 1 | 10 |
| Partisipasi masyarakat | 5 | 1 | 5 | 20 | 2 | 40 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 25 | 3 | 75 |
| Jumlah Peringkat program | 100 | 16 | 260 | 100 | 15 | 235 | 100 | 11 | 165 | 100 | 13 | 190 | 100 | 13 | 200 | 100 | 13 | 205 |
| Peringkat program | I | | | II | | | VI | | | V | | | IV | | | III | | |

Sumber: Hasil Analisis, 2003 (direvisi)

Keterangan:

- A. Program pembangunan pertanian berkelanjutan
- B. Program pembangunan SDM
- C. Program konservasi lingkungan
- D. Program pembangunan infrastruktur fisik
- E. Program industrialisasi pedesaan
- F. Program memperkuat kelembagaan local
- Bt = bobot
- N = nilai
- Jml = jumlah (bobot x nilai)

Berdasarkan matriks tersebut, terlihat bahwa program pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan prioritas pertama dengan skor 260. Pembangunan pertanian berkelanjutan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) mengontrol penebangan hutan secara liar (*deforestation*); (2) menambah cadangan air tanah; (3) menyediakan air yang cukup bagi sektor pertanian; (4) membatasi dan mengontrol alih fungsi lahan; (5) meningkatkan kemampuan petani dalam mewujudkan diversifikasi pangan; (6) meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan dan sub sektor lainnya; (7) meningkatkan tingkat upah pekerja sektor pertanian; (8) meningkatkan peranan dari akses perkreditan bagi petani; dan (9) mengangkat daya jual petani yang didukung oleh kebijakan pemerintah dengan dilandasi keberpihakan bagi petani. Pembangunan pertanian berkelanjutan ini merupakan fondasi dasar sistem perekonomian pedesaan.

Skenario Pembangunan

Penentuan prioritas program tidak cukup diperhitungkan untuk jangka pendek saja, tapi juga diperhitungkan untuk jangka panjang, mengingat manfaat dan dampak dari pembangunan biasanya akan terlihat pada jangka waktu yang lama. Untuk itulah kondisi yang akan datang perlu dianalisis dengan analisis skenario.

Analisis skenario merupakan suatu teknik dari perencanaan yang menyusun urutan-urutan kejadian secara logic untuk memperlihatkan bagaimana situasi sekarang dan situasi yang akan datang dapat berkembang setahap demi setahap. Dalam analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu: skenario status quo dan skenario normative (Tabel 5). Asumsi yang digunakan untuk skenario status quo adalah: (a) industrialisasi pedesaan tidak dipengaruhi oleh issue social atau lingkungan dan (b) rata-rata pertumbuhan ekonomi 10%. Sedangkan asumsi yang digunakan untuk skenario normatif adalah: (a) pembangunan berkelanjutan, (b) partisipasi masyarakat tinggi, (c) desentralisasi, (d) pembangunan berwawasan lingkungan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, dan (e) pertumbuhan merata.

Hasil analisis skenario tersebut merupakan langkah selanjutnya dalam pembuatan kebijaksanaan pembangunan pedesaan. Kebijaksanaan pembangunan pedesaan ini merupakan kerangka dari format program pembangunan.

Kebijaksanaan pembangunan wilayah (pedesaan) secara umum dapat dipilah menjadi tiga, yaitu: (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan social ekonomi; (2) kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran; dan (3) kebijaksanaan khusus menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Tabel 5. Analisis Skenario

| No | Perspektif | Skenario I (Status Quo) | Skenario II (Skenario Normatif) |
|----|--|---|---|
| 1 | Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> a) Deforestation tidak mencapai 5% b) Kondisi lahan kering masih mendominasi Kabupaten Karangasem c) Alih fungsi lahan masih rendah d) Lebih dari 70% tenaga kerja terserap di sektor pertanian e) Faktor input masih menjadi faktor penentu peningkatan produksi dan produktivitas lahan f) Sistem tebasan masih disukai para petani g) Jaminan harga bagi komoditi pertanian belum terealisasi h) Realisasi perkreditan tidak 100% dinikmati petanian. | <ul style="list-style-type: none"> a) Deforestation diperkecil hingga 1% b) Diversifikasi pangan diterapkan c) Hortikultura dan tanaman perkebunan dikembangkan secara lebih intensif d) Tenaga kerja di sektor pertanian (buruh tani) tersedia di pedesaan itu sendiri dan upah yang diterima sama dengan upah tenaga kerja dari luar. e) Pemerintah menjamin faktor input petani sebesar 5% f) Kekuatan tawar menawar antara petani dengan ijon sesuai dengan kesepakatan g) Produk impor dibatasi sehingga harga komoditi/produk petani minimal break event point dengan input h) Perkreditan ditujukan untuk memperkuat UKM i) LPD tetap bertahan untuk bermitra dengan petani |
| 2 | Industri (kecil/kerajinan RT dan pariwisata) | <ul style="list-style-type: none"> a) Hampir 50% merupakan tenaga kerja wanita b) Migrasi musiman akan meningkat c) Penambahan areal untuk industri (pariwisata) semakin meningkat tanpa adanya perencanaan tata ruang yang matang d) Investasi di sektor pariwisata semakin meningkat e) Wisatawan sangat menyukai wisata alam dan wisata budaya | <ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan ketrampilan/kursus diperdalam b) Peraturan daerah harus menetapkan batas maksimum areal pariwisata c) Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB dapat meningkat dari 50% menjadi 75% |
| 3 | Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> a) Erosi masih dapat ditanggulangi b) Cadangan air terbatas pada musim kemarau c) Pengaruh dari industri masih di bawah ambang batas | <ul style="list-style-type: none"> a) Diperkuat melalui badan hukum tentang hak ulayat masyarakat sekitar hutan dan sanksi terhadap penebangan hutan yang illegal b) Digali sumber-sumber air lainnya c) Penggunaan bahan baku kimiawi dibatasi bagi limbah industri dan dibanhukumkan sanksi terhadap pencemaran lingkungan |
| 4 | SDM | <ul style="list-style-type: none"> a) Penduduk miskin masih diatas 15% b) Laju pertumbuhan 0,5%/tahun c) Gondok ibu hamil masih diatas 30% d) Angka kematian ibu 105,12 per 100 ribu kelahiran hidup e) Angka kematian bayi 4,16 per 1000 kelahiran hidup | <ul style="list-style-type: none"> a) Penduduk miskin berkurang menjadi di bawah 15% b) Laju pertumbuhan bertambah 0,25%/tahun c) Gondok ibu hamil berkurang hingga mencapai 10% d) Angka kematian ibu dan bayi berkurang 10% dari keadaan semula |

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> f) Angka harapan hidup 70,5 tahun g) Penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur 50,83% h) Distribusi guru tidak merata i) Mayoritas populasi berpendidikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama j) Lebih dari 50% penduduk tergolong usia kerja | <ul style="list-style-type: none"> e) Penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur meningkat di atas 50% f) Rasio guru dan murid 18 : 1 (untuk SD) dan 16 : 1 (untuk SMP) g) Beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu |
| 5 | Infrastruktur fisik | <ul style="list-style-type: none"> a) Fasilitas SMU belum terdapat di Kecamatan Bebandem b) Fasilitas listrik melayani seluruh desa c) Fasilitas komunikasi (telepon) belum merata d) Cadangan air tanah semakin berkurang e) Tenaga medis dan non medis tersebar merata di pedesaan f) Fasilitas jalan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> a) Dibangun SMU di kecamatan tersebut b) Minimal setiap kecamatan memiliki satu atau dua wartel c) Dibangun tempat-tempat penampungan air yang lebih memadai d) Akses untuk mengembangkan aktivitas ekonomi lebih tinggi |
| 6 | Kelembagaan lokal | <ul style="list-style-type: none"> a) Kelembagaan subak sangat eksis dan potensial bagi aktivitas sosial dan ekonomi b) Kelembagaan desa adapt mampu menggerakkan partisipasi masyarakat c) Filosofi Tri Hita Karana sudah melekat pada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> a) Dibentuk badan hukum bagi keberadaan subak b) Subak dan desa adat menjadi lembaga penyokong perekonomian pedesaan |

Sumber: Hasil Analisis, 2003 (direvisi)

Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dalam kerangka kebijaksanaan ini pula termasuk penciptaan ketentraman suasana sosial dan politik, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro secara sistematis, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Upaya peningkatan tersebut harus didukung dengan beberapa akses, seperti: (1) akses terhadap sumberdaya; (2) akses terhadap teknologi, melalui kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien; (3) akses terhadap pasar, dimana produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah atau tersedianya pasar secara terus menerus; dan (4) akses terhadap sumber pembiayaan.

Kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan masyarakat pedesaan khususnya masyarakat miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya akan mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar. Peran tokoh masyarakat, termasuk aparat daerah yang paling dekat dengan masyarakat sangat diperlukan dalam proses transisi tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk miskin harus memberikan jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses.

Format Program Pembangunan

Konsep pembangunan pedesaan terpadu harus mencakup dua aspek, yaitu keterpaduan secara fungsional dan keterpaduan secara tataruang. Keterpaduan secara fungsional merupakan keterpaduan semua kegiatan sosial ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial penduduk, termasuk kesehatan, pendidikan, pertanian, industri dan semua aspek kehidupan masyarakat. Setiap kegiatan pembangunan harus menaruh perhatian pada pemanfaatan perubahan yang terjadi pada hubunganantar sector di samping mengejar tujuan klasik, yaitu target.

Tabel 6. Format Program

| Program | Deskripsi Proyek | Tujuan | Sasaran | Manfaat yang Diharapkan | Kurun Waktu | Instansi Penanggung Jawab |
|--|---|---|--|--|-------------|--|
| A. Pembangunan pertanian berkelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pertanian rakyat terpadu 2. Pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana 3. Pengembangan usaha pertanian 4. Diversifikasi pangan dan gizi 5. Manajemen sumberdaya air 6. Pengembangan hortikultura dan perkebunan 7. Pemberian kredit lunak melalui UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan petani terhadap diversifikasi pangan 2. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dan sub sektor lainnya 3. Memperbaiki tingkat upah pekerja di sektor pertanian 4. Meningkatkan peranan dari akses perkreditan bagi petani 5. Meningkatkan daya jual petani yang didukung oleh kebijakan keberpihakan bagi petani | Petani | Petani mampu sebagai subyek penentu kebijakan pertanian | 5 tahun | Dinas Pertanian, Lembaga Keuangan (yang memberikan kredit bagi petani) |
| B. Pembangunan SDM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fasilitas pendidikan menengah pertama dan umum 2. Pengembangan taman bermain dan taman bacaan (perpustakaan) bagi anak-anak 3. Pelatihan manajemen dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja 4. Pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin 2. Meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship 4. Meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja 5. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak | Wanita dan anak-anak serta penduduk usia kerja | Peningkatan kualitas kesehatan dan ketrampilan kerja | 5 tahun | Dinas Tenaga Kerja, Pendidikan dan Dinas Kesehatan |
| C. Konservasi Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian hutan lindung 2. Pengembangan hutan kemasyarakatan 3. Pengembangan hutan cadangan pangan 4. Rehabilitasi lahan kritis 5. Manajemen sumberdaya air dan pengontrolan polusi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengontrol penebangan hutan secara liar (deforestation) 2. Menambah cadangan air tanah 3. Memperkecil terjadinya degradasi lahan (erosi tanah) 4. Mencegah terjadinya polusi (air dan sampah) | Masyarakat di sekitar lokasi | Mampu mengontrol lokasinya dari degradasi lahan dan mampu manage lahannya menjadi lahan produktif dengan tetap menjaga keseimbangan alam | 10 tahun | Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BPN, Bappedal |
| D. Pembangunan infrastruktur fisik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan jaringan komunikasi sampai ke tingkat desa 2. Perluasan pelayanan air bersih ke pedesaan (khususnya daerah kering) 3. Pengembangan listrik pedesaan (untuk dusun-dusun yang belum terlayani) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aktivitas sosial ekonomi 2. Meningkatkan kerjasama antar desa | Masyarakat pedesaan | Masyarakat dapat menikmati peluang untuk melakukan aktivitas sosial ekonominya baik di desa itu sendiri maupun di luar desa | 5 tahun | Dinas Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, PDAM, PLN |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|---------|--|
| E. Pembangunan Industrialisasi Pedesaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pasar di setiap desa 2. Pembangunan sentra-sentra produksi kerajinan 3. Pemberian kredit lunak bagi pengrajin melalui UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aktivitas non pertanian 2. Memobilisasi sumber-sumber finansial 3. Meningkatkan kerjasama antar desa | Petani/pengrajin | Peningkatan pendapatan petani/pengrajin | 5 tahun | Dinas Perindustrian/Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja |
| F. Pembangunan Memperkuat Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan badan hukum bagi subak 2. Pengembangan subak sebagai lembaga ekonomi secara kompetitif 3. Peningkatan keamanan wilayah dengan memperkuat keberadaan desa adat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan 2. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan | Masyarakat pedesaan | Memperkuat dan mempertahankan keamanan dan kestabilan pedesaan | 5 tahun | Dinas-dinas yang terkait dengan keberadaan subak, Badan Pembina Lembaga Adat |

Sumber: Hasil Analisa, 2003 (direvisi)

Keterpaduan tataruang mencakup pengertian bahwa semua kegiatan sosial ekonomi membutuhkan dan sangat tergantung pada lokasi atau di mana tempat semua kegiatan tersebut berlangsung dan bagaimana hubungan di antara lokasi-lokasi tersebut. Faktor-faktor yang penting dalam hubungan tataruang adalah kemudahan fasilitas prasarana dan pelayanan, seperti: jalan, transportasi, waktu, dan jarak tempuh, tingkat kepadatan penduduk, ongkos untuk mendapat pelayanan dan sebagainya.

Dalam ruang lingkung tersebut, suatu strategi pembangunan pedesaan terpadu harus diarahkan dan dituju bersama. Pendekatan pembangunan yang digunakan untuk kabupaten/kotamadya (khususnya pedesaan) adalah pendekatan yang bersifat spasial, multisektoral dan terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan, yang diimplementasikan melalui format pembangunan (Tabel 6).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Studi makro merupakan salah satu alat analisis perencanaan pembangunan yang terpadu (*integrated*) bagi kabupaten. Studi makro juga menganalisis situasi yang ada, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masing-masing sektor, mengidentifikasi dan menganalisis potensi dan pembatas di kabupaten, serta akhirnya memberikan rekomendasi program-program yang dibutuhkan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang *sustainable*.
2. Kabupaten Karangasem merupakan pelayan komoditas pertanian.
3. Potensi yang dimiliki di kabupaten ini antara lain: (a) tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian sebesar 75,62%; (b) tingginya usia produktif (70%); (c) lebih dari 50% wanita bekerja di sektor industri kecil/kerajinan rumah tangga; (d) adanya jiwa kewirausahaan yang tinggi dari pengrajin; (e) adanya aturan tertulis dan lisan dari kelembagaan subak dan desa adapt; dan (f) filsafah hidup yang masih melekat pada masyarakat Bali (Tri Hita Karana).
4. Masalah yang dihadapi di kabupaten ini, antara lain: (a) tingginya harga saprodi; (b) penggunaan lahan yang semakin terbatas; (c) modal terbatas akibat terbatasnya kredit yang diperlukan petani dan terlalu panjangnya birokrasi perkreditan; (d) pemasaran terbatas; (e) penggunaan teknologi terbatas; (f) fluktuasi harga dan musim dari produk-produk pertanian tidak dapat diprediksi secara pasti; (g) terbatasnya akses untuk

melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan ketrampilan (kursus-kursus) karena keterbatasan fasilitas; (h) masih rendahnya ketrampilan pengobatan dari para tenaga sukarelawan; dan (i) keterbatasan sumberdaya finansial pemerintah setempat.

5. Kebutuhan yang diperlukan di kabupaten ini meliputi: (a) adanya jaminan harga produk pertanian; (b) pasar yang dapat menampung hasil produksi; (c) bantuan permodalan dari bantuan dukungan dan permodalan dari pemerintah dan swasta untuk mengembangkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), (d) penyediaan fasilitas pendidikan tinggi serta pembinaan ketrampilan berkelanjutan dari pemerintah setempat, (e) bantuan finansial dari pihak asing untuk pembangunan daerah, dan (f) koordinasi yang searah dan terbuka antara masyarakat, desa adat, dan instansi setempat.
6. Faktor pembatas di kabupaten ini adalah lebih dari 90% topografinya adalah lahan kering, terbatas sumberdaya hutan (kurang dari 20%) sehingga cadangan air menjadi terbatas.
7. Matriks masalah, potensi, dan matriks kebutuhan merupakan kerangka dasar dalam pembuatan format program pembangunan wilayah, yaitu: program pembangunan pertanian berkelanjutan, program pembangunan sumberdaya manusia, program konservasi lingkungan, program infrastruktur fisik, program industrialisasi pedesaan, dan program pembangunan memperkuat kelembagaan.

Saran

Saran-saran yang dapat diajukan meliputi:

1. Dalam perencanaan wilayah, pelaksanaan pembangunan selektif sebaiknya memasukkan empat aspek, yaitu: deliniasi wilayah, determinasi strategi untuk pembangunan, rekomendasi proyek, dan peran serta masyarakat.
2. Pembangunan pedesaan sebaiknya diarahkan pada pengembangan UMKM melalui pembentukan wadah lembaga ekonomi di tingkat kelompok tani/subak dengan didukung oleh legalitas subak sehingga diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah terhadap akses sumberdaya, akses teknologi, akses pasar, dimana produk yang dihasilkan dapat dijual secara kontinyu dan akses terhadap sumber pembiayaan.
3. Pemilihan kecamatan secara representative ini sebaiknya perlu dikaji lebih mendalam dan jika sesuai dengan kriteria pembentukan pusat-pusat pertumbuhan maka perlu ditindaklanjuti melalui *integrated top down-bottom up planning*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chamber, Robert. 1992. *Rural Appraisal : Rapid, Relaxed, and Participatory*. Institute of Development Study, London.
- Hoover, Edgar M. 1975. “**An Introduction to Regional Economics**. Alfred A. Knopf, New York, Second Edition.
- Misra, R.P. 1977. *Regional Development Planning: Search for Bearing*. UNCRD. Nagoya.
- Y. Dior, 1996. “**The Planning Process,**” dalam *International Review of Administrative Sciences*, Vol.29, No. 1, hal 50.
- Widhianthini, 2006, dkk. **Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Perencanaan Partisipatif (Revisi). Rural Development Pioneer Project (Propinsi Bali)**. Kerjasama antara *Consulting Service for Small Scale Irrigation Management Project (III)* dengan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana.